

Gelar Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas, DPR Minta Komitmen 3 Kepentingan



Realitarakyat.com – Komisi VII DPR RI menggelar fit and proper test Calon Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) masa jabatan 2021-2025, hari ini, Senin (28/6/2021), diikuti oleh 7 dari 18 calon yang disodorkan Presiden Joko Widodo.

Anggota Komisi VII Fraksi PKB Abdul Wahid berharap Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas yang mengikuti fit and proper test mempunyai komitmen terhadap tiga kepentingan. Ketiga kepentingan itu adalah sektor yakni masyarakat, pengusaha dan pemerintah.

“Semua ada 18 orang calon, hari ini 7 yang menjalani tes,” ujar Abdul Wahid kepada wartawan.

Menurutnya, dengan penekanan tiga sektor kepentingan itu, Ketua dan Anggota Komite BPH Migas diingatkan pula komitmennya agar tidak menyalahgunakan kepercayaan yang nantinya diberikan dengan menjadi makelar.

“Itu yang diharapkan, mereka jangan jadi makelar diantara salah satu,” tegas Wahid.

Ia menyatakan, posisi BPH Migas sebagai pengatur urusan hilir minyak dan gas saat ini masih sangat dibutuhkan. Pasalnya, urusan hilir tak elok diserahkan ke pemerintah karena akan memposisikan pemerintah sebagai bagian dari bisnis dan negara tak elok berbisnis dengan rakyatnya.

“Saat pembahasan UU Ciptaker, KemenESDM memang sempat meminta agar BPH tidak punya wewenang soal Pipa Gas, tapi kita tak setuju jika kewenangan itu diberikan ke Ditjen Migas di KemenESDM,” kata Wahid.

Ia memandang eksistensi BPH Migas diperlukan karena urusan Migas di hilir memang harus ada pihak netral yang mengatur. Wahid mencontohkan ketika dunia usaha berencana memasok gas ke kawasan industri lalu membuat pipa gas, maka harus dilakukan tender agar proses menjadi terbuka.

“Jika bagian ini jadi kewenangan pemerintah, ada kekhawatiran terjadi penunjukan langsung kepada perusahaan-perusahaan yang dikehendaki,” pungkas Abdul Wahid.[prs]